No. Reg: 2201204720109018

**PROPOSAL PENELITIAN DASAR**

**INTEGRASI KEILMUAN**



**NEGARA & *CIVIL SOCIETY***

Analisis Relasional Nahdlatul Ulama dengan Pemerintah di Era Reformasi

DISUSUN OLEH:

**Dr. A. Bakir Ihsan**

(Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Jakarta)

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

KEMENTERIAN AGAMA RI

2017

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI ....................................................................................................... 2

A. Latar Belakang ................................................................................... 3

B. Perumusan Masalah ................................................................................... 6

C. Kajian Teori dan Kajian Pustaka ....................................................................... 7

D. Metode ............................................................................................... 11

F. Data dan Sumber Daya ................................................................................... 12

G. Jadwal Pelaksanaan ............................................................................ 12

H. Rencana Anggaran Biaya ..............................................................................

9. Pelaksana ......................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 13

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................. 14

1. CV
2. RBA Penelitian

**NEGARA & *CIVIL SOCIETY***

Analisis Relasional Nahdlatul Ulama dengan Pemerintah di Era Reformasi

1. **Latar Belakang**

Peran *civil society* menjadi sangat penting di tengah ikhtiar menguatkan (konsolidasi) demokrasi. Walaupun keduanya memiliki ranah yang berbeda dalam konteks wewenang, namun output yang dihasilkan dari kerja kedua kekuatan tersebut sangat signifikan bagi transformasi sosial. Itulah sebabnya dalam beberapa kasus, negara dan *civil society* berjalin kelindan, tapi pada titik yang lain bisa bersimpang jalan.

Dalam hal kebijakan *full day school* yang digagas oleh pemerintah, misalnya, mendapatkan reaksi sangat keras dari *civil society,* dalam hal ini Nahdlatul Ulama (NU). Beragam negosiasi dan pendekatan yang dijalankan oleh NU berhasil menggugurkan rencana kebijakan tersebut. Ini menjadi salah satu bukti dari keberhasilan civil society dalam memengaruhi negara.

Efektivitas relasi negara dengan *civil society* dapat diukur melalui respons negara terhadap aspirasi yang diperjuangkan oleh *civil society*. Respons tersebut bisa positif, bisa juga negatif. Positif ketika perjuangan *civil society* diterima oleh negara, sementara negatif ketika aspirasi *civil society* ditolak atau diabaikan oleh negara. Ketika aspirasi *civil society* diterima oleh negara merupakan keberhasilan yang istimewa karena civil society tidak memiliki wewenang fungsi mengubah kebijakan. Karena itu menjadi sangat menarik untuk menelaah lebih jauh relasi *civil society* yang direpresentasikan oleh NU dengan negara di era reformasi di tengah euforia politik yang menempatkan kekuatan politik lainnya, yaitu partai politik melalui kadernya di legislatif sebagai penentu kebijakan.

Aspirasi yang diperjuangkan oleh NU sejak bergulirnya era reformasi sudah banyak dilakukan. Namun sejauhmana efektivitas perjuangan tersebut khususnya ketika berhadapan dengan negara berlangsung, strategi apa yang dipakai oleh NU dalam menegosiasikan aspirasinya, dan melalui saluran apa aspirasi tersebut diperjuangkan. Melalui metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk melihat formulasi relasi negara dan civil society melalui studi kasus NU sebagai organisasi kemasyarakatan yang punya sejarah panjang berhadapan dengan negara.

Asumsi sementara yang terbangun dalam konteks relasi antara negara dan *civil society* melalui studi atas perjuangan NU adalah adanya dinamika relasional mulai yang bersifat akomodatif, simbiosis, kompromistis, atau bahkan dalam perspektif Maurice Duverger (2005) sebagai antagonis. Karena itu, penelitian ini berangkat dari 3 (tiga) kerangka teoretis, yaitu tentang negara, *civil society,* dan sistem politik (David Easton, 1957). Ketiga teori tersebut merupakan kerangka analisis untuk menjawab relasi negara dengan *civil society* dengan memotret perjuangan NU selama era reformasi. Dengan demikian, dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan potret detail melalui temuan varian-varian baru dalam relasi tersebut.

Eksistensi *civil society* menjadi bagian penting dalam menentukan konsolidasi demokrasi. Efektivitas ruang publik yang egaliter yang menguatkan mekarnya partisipasi merupakan bagian peran yang bisa dimainkan oleh *civil society*. Ia menjadi fondasi bagi lahirnya masyarakat yang *civilized*. Alexis de Tocqueville misalnya menempatkan *civil society* sebagai kekuatan yang memiliki relasi penting dengan politik.[[1]](#footnote-2) Sementara Ernest Gellner menempatkan *civil society* sebagai lembaga yang cukup kuat untuk mengimbangi negara. Begitupun Samuel P Huntington memposisikan *civil society* sebagai kekuatan penting dalam mempromosikan demokrasi seiring peran partai yang cenderung menurun.[[2]](#footnote-3)

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu organisasi muslim terbesar di Indonesia mempunyai peran penting dalam transformasi sosial di Indonesia, khususnya dalam dua ranah, yaitu penguatan pemahaman keagamaan (keislaman) dan penguatan rasa kebangsaan (keindonesiaan) yang bersintesis menjadi keislaman-keindonesiaan atau Islam kita.[[3]](#footnote-4) Peran yang dimainkan oleh NU pasca kemerdekaan mengalami pasang surut berhadapan dengan sistem politik kekuasaan. Pada dasarnya NU sebagai *civil society* yang beraliran sunni menempatkan negara atau kepemimpinan sebagai sebuah kemutlakan yang harus dijaga demi harmoni dan keberlangsungan kehidupan masyarakat yang damai.[[4]](#footnote-5)

Di era Orde Lama, relasi NU dengan negara sangat intim bahkan pada titik tertentu menjadi bagian yang menentukan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dalam hal ini Soekarno sebagai kepala negara.[[5]](#footnote-6) Pada masa tersebut, NU menjadi partai politik dengan perolehan suara yang cukup signifikan dibandingkan dengan partai politik lainnya yang memiliki basis muslim. Pada pemilu 1955 NU berhasil tampil sebagai partai ketiga di bawah PNI dan Masyumi. Perolehan suara Partai NU pada Pemilu parlemen 29 September 1955, yaitu 18,4% atau hampir 7 juta suara atau setara dengan 45 kursi di DPR, menunjukkan keberhasilan memperluas dukungan dan memperkuat loyalitas kaum nahdliyin terhadap NU sebagai ormas yang dipimpin oleh para kiai. Perolehan suara NU mampu menyaingi perolehan suara Partai Masyumi yang ditinggalkannya yang memperoleh 20,9% suara. Sementara pada Pemilu untuk konstituante yang dilaksanakan pada 15 Desember 1955 NU memperoleh 91 kursi dari 514 kursi yang diperebutkan.[[6]](#footnote-7)

NU sebagai partai politik punya ruang negosiasi yang luas sekaligus kuat berhadapan dengan kekuasaan. Hal ini terbukti dengan posisi yang ditempati kader-kader NU di pemerintahan pada era Orde Lama.

Tabel 1.1:

**Daftar Kader NU dalam Pemerintahan di Era Orde Lama**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KABINET** | **NAMA** | **JABATAN** | **KETERANGAN** |
| 1 | Kabinet Natsir  6/9/1950-27/4/1951 | KH Wahid Hasjim | Menteri Agama |  |
| 2 | Kabinet Sukirman  27/4/1951-3/4/1952 | KH Wahid Hasjim | Menteri Agama |  |
| 3 | Kabinet Wilopo  3/4/1952-30/7/1953 |  |  |  |
| 4 | Kabinet  Ali Sastroamidjojo I  30/7/1953-12/8/1955 | Zainul Arifin | Wakil PM II | Sejak 23/10/1954 |
| KH Masjkur | Menteri Agama |  |
| Mohammad Hanafiah | Menteri Agraria | Hingga 19/11/1954 |
| Mr. Sunarjo | Mendagri | Sejak 19/11/1954 |
| 5 | Kabinet  Burhanuddin Harahap  12/8/1955-24/3/1956 | Mr. Sunarjo | Mendagri | Hingga 19/1/1956 |
| KH Mohammad Iljas | Menteri Agama | Hingga 19/1/1956 |
| 6 | Kabinet  Ali Sastroamidjojo II  24/3/1956-9/4/1957 | KH Idham Chalid | Wakil PM II |  |
| Mr. Sunarjo | Mendagri |  |
| Mr. Burhanuddin | Menteri Perekonomian |  |
| KH Fatah Jasin | Menteri Sosial |  |
| KH Mohammad Iljas | Menteri Agama |  |
| 7 | Kabinet Karya  9/4/1957-10/7/1959 | KH Idham Chalid | Wakil PM |  |
| Prof. Drs. Sunardjo | Menteri Perdagangan | Hingga 25/6/1958 |
| KH Mohammad Iljas | Menteri Agama |  |
| Mr. Sunarjo | Menteri Agraria |  |
| Rahmat Muljomiseno | Menteri Perdagangan | Sejak 25/6/1958 |
| KH Wahib Wahab | Menteri Kerjasama Sipil-Militer | Sejak 25/6/1958 |
| 8 | Kabinet Kerja  10/7/1959-27/8/1964 | KH Fatah Jasin | Menteri Muda untuk Hubungan dengan Ulama |  |
| KH Wahib Wahab | Menteri Agama | Hingga 26/2/1962 |
| KH Saifuddin Zuhri | Menteri Agama | Sejak 1/3/1962 |
| Zainul Arifin | Juru Bicara DPR Gotong Royong | Sejak 6/3/1962-2/3/1963 (meninggal) |
| KH Idham Chalid | Wakil Juru Bicara II MPRS | Sejak 6/3/1962 |
| KH Achmad Sjaichu | Wakil Juru Bicara IV DPR Gotong Royong | Sejak 13/11/1963 |
| 9 | Kabinet Dwikora  27/8/1964-28/3/1966 | H. Aminuddi Aziz | Mensesneg |  |
| KH Saifuddin Zuhri | Menko Urusan Agama |  |
| KH Mohammad Iljas | Menteri Hubungan Ulama-Pemerintah |  |
| KH Fatah Jasin | Menteri Negara Pembantu Menko Urusan Agama |  |
| KH Idham Chalid | Wakil Jubir II MPRS |  |
| H. Achmad Sjaichu | Wakil Jubir IV DPR Gotong Royong |  |
| H. Mohammad Hasan | Menteri Pendapatan, Pendanaan, dan Pengawasan | Sejak 16/6/1965 |
| Kabinet Dwikora Hasil Reshuffle  28/3/1966-25/7/1966 | KH Idham Chalid | Wakil Perdana Menteri II |  |
| KH Saifuddin Zuhri | Menteri Agama |  |
| H. Aminuddin Aziz | Menteri Pengembangan Masyarakat Desa |  |
| H. Achmad Sjaichu | Sekretaris Umum Front Nasional |  |
| 10 | Kabinet Ampera  25/7/1966-6/6/1968 | KH Idham Chalid | Menteri Utama Kesra |  |
| KH Saifuddin Zuhri | Menteri Agama | Hingga 17/10/1967 |
| KH Mohammad Dachlan | Menteri Agama | Sejak 17/10/1967 |

Sumber: Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta, LKiS, 2007, Cet. III, hal. 373-375

Dengan posisi di pemerintahan tersebut, NU bisa melahirkan kebijakan yang sesuai dengan misi yang dibawanya dan memberikan dampak manfaat bagi umat Islam dan masyarakat pada umumnya, terlebih kaum nahdliyyin. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari kekuasaan yang memberi ruang bagi implementasi “kepentingan” yang dibawanya.

Pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru melahirkan dinamika baru bagi politik NU. Orde Baru sebagai antitesa dari Orde Lama menempatkan seluruh kekuatan sosial, termasuk NU sebagai subordinat negara dengan kontrol yang sangat kuat. Depolitisasi yang diterapkan oleh Orde Baru atas nama stabilitas mengharuskan ketundukan tanpa reserve. Konsekuensinya adalah semakin sempitrnya ruang publik yang menjadi ranah perjuangan NU sebagai bagian dari *civil society* sekaligus mengerdilkan ranah politik NU yang sangat kuat pada era sebelumnya. Bahkan dalam perjalanannya NU menjadi kekuatan yang “berhadapan” dengan negara.[[7]](#footnote-8)

Di era reformasi, NU menemukan kembali ranah perjuangannya melalui ruang ekspresi yang tersedia luas. Sama seperti saat awal kemerdekaan, NU menikmati kebebasan setelah sekian lama dibungkam oleh Orde Baru. Bahkan reformasi mengantarkan tokoh NU, KH Abdurrahman Wahid sebagai presiden terpilih pertama di era reformasi. Namun demikian, NU tidak menempatkan dirinya menjadi partai politik sebagaimana terjadi pada saat Orde Lama. NU di bawah kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid membentuk partai politik sebagai saluran aspirasi khususnya warga nahdliyyin yang berkeinginan kuat untuk mempunyai partai politik. Dari sinilah hadir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai wadah perjuangan politik kaum nahdliyyin tanpa kehilangan wadah sosialnya yang sejak lama ditekuni oleh NU sebagai *civil society*. NU tetap menjadi *civil society* dengan perannya yang semakin signifikan tanpa harus menjadi partai politik karena keistiqamahannya dalam menapaki kegiatan sosial yang tak pernah surut bahkan di era rezim Orde Baru yang otoriter.[[8]](#footnote-9)

Peran NU di era reformasi muncul sebagai sintesa dari dua orde rezim sebelumnya, yaitu *pertama*, Orde Lama yang merayakan politik sebagai panglima dan NU tampil sebagai partai politik dan *kedua*, Orde Baru yang menekankan stabilitas politik dan perayaan modernisasi melalui penguatan budaya dan NU berkhidmat sepenuhnya pada pengembangan dan pemberdayaan sosial keummatan. NU di era reformasi tampil sebagai jembatan yang menghubungkan negara (*state*) dengan masyarakat (*society*) melalui ragam dinamika relasi yang konstruktif bagi eksisten NU, umat, dan warga negara.

**B. Perumusan Masalah**

Peran sintesis yang dimainkan oleh NU di era reformasi menjadi sangat strategis karena bisa menguatkan akar sosialnya dengan tetap menjadi kekuatan yang dipertimbangkan oleh kekuasaan (negara). Posisi strategis ini sejatinya memudahkan NU untuk menyinambungkan antara aspirasi nahdliyyin dengan kebijakan yang diambil oleh negara. Karena itu, penelitian ini berusaha menelaah posisi strategis tersebut sebagaimana yang seharusnya (das solen) dengan kenyataan yang dirasakan (das sien) oleh kaum nahdliyyin khususnya dan seluruh lapisan sosial. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada tiga pertanyaan penting sebagai berikut;

1. Apa strategi NU dalam menegosiasikan aspirasinya terhadap negara?
2. Bagaimana respons negara terhadap aspirasi yang diperjuangkan oleh NU?
3. Sejauhmana efektivitas perjuangan NU berhadapan dengan negara di era reformasi?

**C. Kajian Teori dan Kajian Pustaka**

Kajian tentang relasi negara dan *civil society* merupakan telaah klasik seiring perkembangan demokrasi. Secara teoretis negara dan *civil society* memiliki sinergitas dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Negara hadir sebagai penyelenggara atas aspirasi dan kehendak masyarakat, sementara *civil society* memastikan kehendak masyarakat bisa diimplementasikan dan dirasakan oleh masyarakat sebagai bagian dari keberdayaannya.

Telaah relasi negara dan civil society sudah banyak dilakukan oleh para ahli baik secara teoretis, konteks historis, maupun komparatif dari sekian relasi yang hadir dalam beragam sistem politik. Secara umum relasi negara dan civil society dapat dipilah dalam tiga moderl. Pertama,

politik dan *civil society* dapat dipilah dalam dua spektrum, yaitu antara relasi yang antagonis dan kompromis, dan antara sebagai lembaga penting dalam demokrasi maupun sebagai duri yang dapat mengancam terhadap demokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa karya klasik, seperti Robert Michel dan Maurice Duverger yang menempatkan partai politik dalam beberapa kasus tak lebih sebagai kekuatan oligarkis yang membagi kekuasaan secara eksklusif berdasarkan kelompoknya. Bahkan John Keane memasukkannya sebagai bagian dari sisi gelap demokrasi.[[9]](#footnote-10) Sementara di sisi lain sebagian ahli, seperti Alexis de Tocqueville, Samuel P. Huntington, dan Robert W. Hefner menempatkan *civil society* sebagai kekuatan konstruktif bagi penguatan masyarakat.[[10]](#footnote-11)

Dalam konteks Indonesia beberapa kajian terkait relasi negara dan *civil society* dapat dipetakan dalam dua perspektif, yaitu *pertama*, negara dan *civil society* sebagai dua kekuatan antagonis. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kajian yang menempatkan NU berhadapan dengan negara. *Kedua*, negara dan civil society sebagai kekuatan terpisah dan negara menjadi penentu terhadap eksistensi civil societ. Ketiga, negara dan civil society sebagai kekuatan simboisis (saling melengkapi) dalam menunjang proses demokratisasi.

Hal ini didasarkan pada beberapa fakta pada awal reformasi yang memperlihatkan peran kuat *civil society* dalam melahirkan reformasi dan mengawalnya melalui penguatan partisipasi politik masyarakat.[[11]](#footnote-12) *Kedua*, “menguatnya” *civil society* di tengah “menurunnya” peran partai politik dan semakin memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap kerja partai politik. Menguatnya *civil society* dengan segala variannya termasuk aspek deviatifnya menjadi kekuatan yang pada titik tertentu sangat mempengaruhi bahkan mengendalikan keputusan yang harus diambil oleh partai politik (DPR RI). Beberapa kasus yang menjadi landasan asumsi “menguatnya” *civil society* ini adalah tertundanya bahkan gagalnya rancangan undang-undang dibahas, apalagi disahkan oleh DPR RI.[[12]](#footnote-13)

Dua spektrum penelitian terkait relasi partai politik dan *civil society* tersebut didasarkan pada aspek perilaku baik pada ranah individu maupun lembaga, sehingga melahirkan dua kesimpulan yang berbeda. Karena itu, penelitian ini mencoba melihat pada output dari relasi partai politik dan *civil society* yang terepresentasi dalam undang-undang. Dengan pendekatan pada sisi output ini diharapkan akan melahirkan varian baru, paling tidak lebih detail dalam konteks relasi kedua organ penting dalam sistem demokrasi.

**1. Negara**

Negara menjadi bagian penting baik dalam konteks teoretis maupun praksis. Kajian terhadap eksistensi negara mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan politik pada umumnya. Negara sebagai kekuatan tunggal telah mencair seiring dengan menguatkan kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat. Negara yang pada awalnya menjadi pusat penentu nafas kehidupan warga negara, secara perlahan terdistribusi dengan kekuatan-kekuatan lainnya yang tumbuh dalam masyarakat, baik dalam bentuk partai politik, media massa, maupun civil society. Secara teoretis, diskursus tentang negara termiminalisasi oleh menguatnya wacana kepemimpinan, elit, budaya, perilaku pemilih, kelompok kepentingan, analisis public policy dan sejenisnya.

Di antara teori negara adalah teori negara otoriterianisme-birokratis, teori negara pluralis, teori negara strukturalis, teori negara organis, dan lainnya. Masing-masing teori menggambarkan posisi negara dalam tatanan kehidupan politik nasional. Negara otoriter menempatkan dirinya sebagai pusat dari segala bentuk aktivitas warganya. Karenannya ia bertopang pada organisasi untuk mudah memusatkan kekuasaannya sekaligus mengontrol aktivitas warganya. Sementara negara pluralis sebaliknya, ia memberi ruang aktualisasi warganya sebagai hak yang dijamin oleh negara. Peluang untuk berkompetisi mendapatkan posisi dalam struktur kenegaraan merupakan ruang yang bisa dinikmati oleh setiap warga negara. Sementara negara strukturalis melihat mekanisme relasi bernegara bersifat struktural dengan menempatkan bagian-bagian dalam negara secara sistemik dan hegemonik. Sementara negara organis menempatkan seluruh kekuatan dalam masyarakat sebagai realitas yang saling mengait dengan mendukung bagi terselenggaranya kehidupan bernegara.

Negara dalam sistem demokrasi menjadi puncak dari proses berlangsungnya distribusi wewenang agar sistem berjalan secara efektif dan maksimal.

Menurut Nordlinger (1994), karakter negara bisa diketahui dengan melihat bagaimana derajad otonomi negara (state autonomy) serta dukungan masyarakat terhadap negara (societal support for the state) tersebut, apakah tinggi, moderat atau rendah. Nordlinger lalu menggolongkan empat tipe negara, yakni negara kuat (strong states), negara independen (independent states), negara responsif (responsive states) dan negara lemah (weak states) (Nordlinger, 1994). Negara kuat adalah negara yang tingkat otonomi dan dukungan masyarakatnya tinggi. Negara bertindak berdasar preferensinya dan masyarakat selalu mendukung tindakan-tindakannya itu. Negara independen adalah negara dengan tingkat otonomi tinggi namun dukungan masyarakatnya rendah. Negara dengan pola seperti ini bisa mewujudkan kepentingannya menjadi kebijakan publik, kendati berbeda dengan preferensi masyarakatnya. Negara responsif adalah negara dengan derajad otonomi rendah tapi dukungan masyarakatnya tinggi. Terakhir, negara lemah ialah negara yang derajad otonomi dan dukungan masyarakat yang rendah. (Nordlinger, 1994).

**2. Civil Society**

*Civil society* merupakan komponen penting dalam tegaknya demokrasi. Secara konseptual *civil society* dianggap sebagai gagasan terpenting di abad ke-20. Bahkan, menurut John Keane, pertumbuhan *civil society* yang mengglobal, memberikan harapan baru bukan hanya bagi demokrasi, tetapi lebih penting lagi, bagi dunia yang ditandai oleh keadaban (*civility*).[[13]](#footnote-14) Secara definitif, civil society mengalami banyak pemaknaan. Ernest Gellner mendefinisikan *civil society* *is the set of instituions which is strong enough to counterbalance the state and, whilst not preventing the state from fulfilling its role of keeper of peace and arbitrator between major interests, can, nevertheless, prevent the state from domination and atomizing the rest of society.*[[14]](#footnote-15) Dari definisi tersebut terlihat jelas posisi *civil society* dalam kehidupan bernegara. Ia menjadi jalan tengah di antara negara dan masyarakat. Tanpa menghilangkan peran negara dan tanpa menghilangkan kedaulatan rakyat, *civil society* hadir untuk menjaga dua kekuatan tetap berada dalam fungsi dan perannya. Karena itu, keberadaan *civil society* menjadi sangat penting bagi partai politik.

Secara historis kehadiran *civil society* merupakan upaya melahirkan masyarakat yang berkeadaban, yang mengerti hak-hak dan kewajibannya, dan masyarakat mampu menentukan pilihan secara bebas. Karena itu, keberadaan *civil society* sangat efektif untuk ikut mengontrol setiap kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya civil society seperti NU dengan keanggotaannya yang sangat banyak sangat penting untuk ditelaah dalam konteks kekuatan negosiasinya berhadapan dengan negara.

Dalam praktiknya, *civil society* tidak selalu berbanding lurus (mensupport) demokrasi. Hal ini terkait dengan realitas sistem politik dan daya serap pengetahuan masyarakatnya.[[15]](#footnote-16) Dalam konteks Indonesia, perubahan rezim yang berlangsung sejak kemerdekaan telah menempatkan *civil society* seperti NU dalam dinamika yang pasang surut.

**3. Sistem politik**

Relasi sebagai implementasi dari interaksi seluruh elemen dalam lingkup kenegaraan merupakan bagian dari sistem politik. Sistem politik meliputi semua struktur dalam semua aspek politik, baik institusi pemerintahan, agen-agen administrasi, termasuk hukum dan legislasi. Menjadi sebuah sistem, maka ia bersifat memaksa semua elemen terkait untuk berada dalam satu interkasi yang saling mempengaruhi baik sebagai rakyat maupun pemerintah. Dalam konteks penelitian ini, partai politik sebagai sebuah sistem mengikat dirinya dalam struktur dan kader-kader yang ada di dalamnya, termasuk yang menjadi wakil di lembaga legislatif.

Begitu juga *civil society* sebagai sebuah organisasi memiliki sistem yang mengikat sesuai agenda dan ranah wewenangnya. Sebagai bagian dari elemen penting masyarakat, maka keberadaan *civil society* menjadi bagian dari dinamika partai politik yang juga menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari eksistensinya. Karena itu, baik partai politik maupun *civil society* memiliki peran untuk memberi input sebagai penggerak dari sistem politik. Pola dan bentuk relasi antara partai politik dengan *civil society* sedikit banyak akan dipengaruhi oleh sejauhmana input-input yang diberikan melahirkan output yang konsisten.[[16]](#footnote-17)

**E. Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif[[17]](#footnote-18) dengan menelaah sedetail dan sedalam mungkin beragam data baik dokumen maupun hasil wawancara terkait peran partai politik dan *civil society* dalam pembahasan RUU di DPR RI. Dari proses tersebut diharapkan diperoleh pemahaman yang mendalam (*deep-understanding*) tentang bentuk relasi partai politik dan civil society.

**E.1. Pembatasan Ruang Lingkup Kajian**

Penelitian ini memfokuskan pada poin-poin yang menjadi bahan masukan dari civil society terhadap DPR RI dalam pembahasan 3 (tiga) rancangan undang-undang (RUU), yaitu RUU Pilkada, RUU Jaminan Produk Halal, dan RUU Pengelolaan Keuangan Haji yang dibahas dan disahkan pada periode 2009-2014.

**E.2. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian terhadap berbagai bahan pustaka (*library research*), baik berupa risalah sidang DPR RI, buku, makalah ilmiah, jurnal, atau naskah-naskah (dokumen-dokumen) lainnya yang berkaitan dengan tiga RUU tersebut. Di samping itu, digunakan pula bahan-bahan lain yang diperoleh melalui data lapangan (*field research*) dan wawancara mendalam (*depth* *interview*)[[18]](#footnote-19) dengan narasumber yang berkompeten, yaitu dari kalangan *civil society* yang memiliki katerkaitan dengan RUU yang dibahas, seperti dengan LSM pemantau Pilkada untuk RUU Pilkada, pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) untuk kasus UU pengelolaan keuangan haji, dengan MUI, Muhammadiyah, dan NU, untuk melihat relasi antara *civil society* dengan partai politik.

**E.3. Teknik Analisa**

Hasil temuan dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa tahapan analisa terhadap; *pertama*, proses pembahasan masing-masing RUU di DPR RI. Analisa ini penting untuk melihat proses pembahasan RUU dan dinamika pandangan masing-masing fraksi di DPR RI. *Kedua*, pandangan *civil society* terhadap 3 RUU baik dalam dengar pendapat (formal) di DPR RI maupun pandangan yang disampaikan secara terbuka di media massa (informal). Dengan analisa terhadap kedua pandangan tersebut, akan dilihat korelasi antara pandangan partai politik dengan *civil society* untuk mengukur tingkat titik temu dan titik pisah antar kedua organ penting dalam demokrasi tersebut. Titik temu dan titik pandang tersebut dikuantifikasi dan dianalisis berdasarkan pemetaan paradigma.

**F. Data dan Sumber Data**

Data penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data-data tersebut berasal dari dokumen-dokumen dan wawancara dengan narasumber baik sebagai sumber utama atau primer (*key informan*) maupun sumber sekunder. Wawancara dilakukan secara mandalam (depth-interview) dengan para ahli dan pelaku terkait dengan masalah penelitian ini.

**G. Jadwal Pelaksanaan**

Penelitian ini akan dilakukan di Jakarta dan beberapat tempat terkait dengan tema penelitian ini, selama 6 bulan (Maret-Agustus 2018). Tempat penelitian adalah Kantor PBNU Jakarta dan di beberapa daerah, Kantor Sekretariat Negara, DPR RI, dan Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor kementerian Agama, dan beberapa pusat data dan dokumen, seperti CSIS, Freedom Institute, dan Lakpesdam.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | BULAN | KEGIATAN | TEMPAT |
| 1. | Maret | Observasi dan pemetaan data-data penelitian | Jabodetabek |
| 2 | April | Pengumpulan data dan wawancara | Jabodetabek |
| 3. | Mei | FGD 1 dan penguatan data | Jabodetabek |
| 4. | Juni | FGD 2 dan analisis data | Jabodetabek |
| 5. | Juli | Penyusunan laporan penelitian | Jabodetabek |
| 6. | Agustus | Finalisasi laporan | Jabodetabek |

**H. Rencana Anggaran Biaya**

**I. Pelaksana**

Penelitian ini dilakukan secara individual sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, yaitu politik. Fokus dari beberapa penelitian yang sudah dijalankan selama ini adalah masalah politik, partai politik, civil society, ideologi, kekuatan politik, lembaga politik, dan budaya politik.

**DAFTAR PUSTAKA**

Alagappa, Muthiah, (Ed.), *Civil Society and Political Change in Asia*, California, Stanford University Press, 2004

Almond, Gabrie,l dan Bingham Powell, *Comparative Politics: System, Process, and Policy*, Boston, MA: Little, Brown, & Co. 1978

Beittinger-Lee, Verena, *(Un) Civil Society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena*, New York, Routledge, 2010

Creswel, John W., *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*, Jakarta: KIK Press, 2002

Duverger, Maurice, *Political Parties*, New York, John Wiley & Sons, Inc., 1965

-----------, *Sosiologi Politik*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005

Gelner, Ernest, *Muslim Society*, New York, Cambridge University Press, 1981

Hadiwinata, Bob Sugeng, “Civil Society: Pembangun dan Sekaligus Perusak Demokrasi”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 9, Nomor 1, Juli 2005

Harrison, Lisa, *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana, 2007

Hefner, Robert W., *Civil Islam*, Jakarta, Institut Studi Arus Informasi, 2001

Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta, Grafiti Pers, 1995

Keane, John, *Civil Society: Old Images, New Visions*, California: Stanford University, 1998.

------------, *The Life and Death of Democracy*, London, Simon & Schuster, 2009

Layton, Robert, *Order and Anarchy, Civil Society, Social Disorder and War*, UK, Cambridge University Press, 2006

Mair, Peter, Wolfgang C. Muller, dan Fritz Plasser (Ed.), *Political Parties and Electoral Change*, California: Sage Publications Ltd., 2004

Maor, Moshe, *Political Parties & Party System,* London: Routledge, 1997

Michels, Robert, *Partai Politik, Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, Jakarta: Rajawali, 1984

Mujani, Saiful, *Muslim Demokrat*, *Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2007

Noor, Firman, “Kegagalan Partai Politik Menarik Simpati Rakyat: Urgensi Sebuah Paradigma Baru Partai Politik”, *Jurnal Penelitian Politik*, Jakarta, LIPI, Vol. 4, No. 1, 2007

Perdana, Aditya, Civil Society dan Partai Politik dalam Demokratisasi di Indonesia, makalah pada Seminar Internasional ke-10 “Representasi Kepentingan Rakyat pada Pemilu Legislatif 2009”, yang diselenggarakan oleh Yayasan Percik, Salatiga, Jawa Tengah, 28-30 Juli 2009.

Tocqueville, Alexis de, *Tentang Revolusi, Demokrasi, dan Masyarakat*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005

1. Alexis de Tocqueville, *Tentang Revolusi, Demokrasi, dan Masyarakat*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005, hal. 116. [↑](#footnote-ref-2)
2. Robert Layton, *Order and Anarchy, Civil Society, Social Disorder and War*, UK, Cambridge University Press, 2006, hal. 12. Baca juga; Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta, Grafiti Pers, 1995, hal. 105 [↑](#footnote-ref-3)
3. Dalam ungkapan yang dimasyhurkan KH Abdurrahman Wahid adalah kita, bangsa Indonesia yang beragama Islam, bukan umat Islam yang tinggal di Indonesia. Baca: Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita,Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta, The Wahid Institute, 2006. [↑](#footnote-ref-4)
4. A. Bakir Ihsan, “Referensi Pemikiran Politik NU”, Jurnal *Refleksi*, Vol. XI, No. 2, 2009, hal. 174 [↑](#footnote-ref-5)
5. Salah satu kasus yang menunjukkan kuatnya pengaruh NU terhadap negara adalah penolakan pembubaran organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang akan dilakukan oleh Soekarno. Berkat masukan dari Menteri Agama RI yang saat itu dijabat oleh KH. Saifuddin Zuhri, tokoh NU, akhirnya rencana pembubaran tersebut tidak terwujud. Baca; KH. Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2013, hal. 671. [↑](#footnote-ref-6)
6. A. Bakir Ihsan, *Ideologi Islam dan Partai Politik*, Jakarta, Orbit Publishing, 2016, hal. 64-65 [↑](#footnote-ref-7)
7. Andree Feillard, *NU vis-a-vis Negara*, Yogyakarta, LKiS, 1999, hal. 105 [↑](#footnote-ref-8)
8. Diantara ahli menempatkan Orde Baru sebagai rezim otoritarianisme-birokratik. Baca: [↑](#footnote-ref-9)
9. Robert Michels, *Partai Politik, Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, Jakarta: Rajawali, 1984. Baca juga; Maurice Duverger, *Political Parties*, New York, John Wiley & Sons, Inc., 1965, hal. 151. Baca juga; John Keane, *The Life and Death of Democracy*, London, Simon & Schuster, 2009. [↑](#footnote-ref-10)
10. Baca; Alexis de Tocqueville, *Tentang Revolusi, Demokrasi, dan Masyarakat*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005, Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta, Grafiti Pers, 1995, dan Robert W. Hefner, *Civil Islam*, Jakarta, Institut Studi Arus Informasi, 2001. [↑](#footnote-ref-11)
11. Salah satu karya penting dalam melihat relasi konstruktif antara civil society dan partai politik, khususnya terkait tumbuhnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu adalah disertasi (buku) Saiful Mujani, *Muslim Demokrat,* Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2007. Baca juga; Aditya Perdana, Civil Society dan Partai Politik dalam Demokratisasi di Indonesia, makalah pada Seminar Internasional ke-10 “Representasi Kepentingan Rakyat pada Pemilu Legislatif 2009”, yang diselenggarakan oleh Yayasan Percik, Salatiga, Jawa Tengah, 28-30 Juli 2009. [↑](#footnote-ref-12)
12. Verena Beittinger-Lee, *(Un) Civil Society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena*, New York, Routledge, 2010, hal. 158. Baca juga; Bob Sugeng Hadiwinata, “Civil Society: Pembangun dan Sekaligus Perusak Demokrasi”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 9, Nomor 1, Juli 2005, hal. 1-22. Melemahnya partai politik juga karena menguatnya oligarki eksklusif di dalam tubuh partai. Baca; Firman Noor, “Kegagalan Partai Politik Menarik Simpati Rakyat: Urgensi Sebuah Paradigma Baru Partai Politik”, *Jurnal Penelitian Politik*, Jakarta, LIPI, Vol. 4, No. 1, 2007, hal. 49. [↑](#footnote-ref-13)
13. John Keane, *Civil Society: Old Images, New Visions*, California: Stanford University, 1998. [↑](#footnote-ref-14)
14. Robert Layton, *Order and Anarchy, Civil Society, Social Disorder and War*, UK, Cambridge University Press, 2006, hal. 12. [↑](#footnote-ref-15)
15. Muthiah Alagappa (Ed.), *Civil Society and Political Change in Asia*, California, Stanford University Press, 2004, hal. 63. [↑](#footnote-ref-16)
16. Gabriel Almond dan Bingham Powell, *Comparative Politics: System, Process, and Policy*, Boston, MA: Little, Brown, & Co. 1978, hal. 4 [↑](#footnote-ref-17)
17. Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 86. [↑](#footnote-ref-18)
18. John W. Creswel, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*, Jakarta: KIK Press, 2002, hal. 140. [↑](#footnote-ref-19)